

Laporan Kinerja (LKJ)

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2017



**Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

Jl. H. Agus Salim Painan

Phone: (0756) 21218

Fax: (0756) 21218

Email: dinkespesirseltan@gmail.com

Website: www.dinkes.pesisirseltankab.go.id



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah SWT, karena izin dan hidayahNya Laporan Kinerja (LKJ) OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 telah dapat diselesaikan dan disusun. Penyusunan LKJ ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pertanggungjawaban (akuntabilitas) disamping beberapa keberhasilan serta kegagalan dan permasalahan dari pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya.

Selain itu, penyusunan LKJ juga bertujuan sebagai perwujudan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah khususnya bidang kesehatan dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKJ OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 ini disusun berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan guna peningkatan kualitas laporan ini.

Painan, 01 Maret 2018

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pessel



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199801 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021	9
B. Perjanjian Kinerja	10
C. Indikator Kinerja Utama	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan	12
B. Hasil Pengukuran Kinerja	19
C. Analisis Capaian Kinerja Keuangan	20
BAB IV PENUTUP	21
A. Kesimpulan	21
B. Saran	21

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin, yang salah satu indikatornya adalah tingginya derajat kesehatan dan tingginya mutu kehidupan. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaan, disamping aspek spiritual. Oleh karena itu pembangunan kesehatan ditujukan guna mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Salah satu Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 yaitu: ***“Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan”*** dengan menerapkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Keadaan ini dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta penerapan teknologi kesehatan secara tepat oleh petugas-petugas kesehatan yang didukung oleh peran serta aktif dari semua unsur dan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan: ***“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan”***, telah berhasil menetapkan dasar-dasar, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu ***“Paradigma Sehat”*** yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak azazi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional dan daerah.

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan tolok ukur dan penilaian indikator kinerja sesuai dengan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 juga merupakan sinergisitas perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 serta berpedoman juga pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030 serta didasari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan Tahun 2016 sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan indikator penetapan kinerja (TAPKIN) Tahun 2016.

B. Kedudukan

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana Bidang Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 30 tahun 2016, maka susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai uraian tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di bidang kesehatan.

Adapun uraian tugasnya yaitu:

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yang ada berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan dinas kesehatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Dinas Kesehatan dengan sekretaris, Kepala Bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran.
- d. Menjalin kerjasama dengan OPD dan instansi vertikal untuk kepentingan Dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan Dinas
- f. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan.
- g. Mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan.
- h. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas agar kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan.

- i. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas agar kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan.
- j. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
- k. Mendisposisi surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya.
- l. Menandatangani dan atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris

Sekretariat mempunyai rincian tugas yang dilaksanakan oleh sub-sub bagian yang terdiri dari :

- 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
- 3) Sub bagian Keuangan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :

- 1) Seksi Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga
- 3) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :

- 1) Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- 3) Seksi Surveilans dan penanggulangan masalah akibat bencana dan kejadian luar biasa/wabah.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :

- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan tradisional
- 2) Seksi rujukan dan jaminan kesehatan
- 3) Seksi mutu pelayanan dan akreditasi

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :

- 1) Seksi Farmasi, makanan, minuman, dan perbekalan kesehatan
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana
- 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

7. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Puskesmas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka Puskesmas sebagai UPTD Dinas Kesehatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, dimana struktur organisasinya terdiri dari Kepala dan KTU, yang mempunyai tugas pokok nya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2014 yaitu melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka terwujudnya Kecamatan Sehat. Fungsi Puskesmas antara lain :

- a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Sedangkan kewenangan Puskesmas adalah:

- a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan.
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor terkait.
- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Puskesmas.
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan.
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan.
- i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
- j. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu.
- k. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- l. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung.
- m. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi.
- n. Melaksanakan rekam medis.
- o. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- p. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKJ) ini berisi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2017.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi penjelasan umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup,

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Penghargaan-penghargaan yang diterima SKPD Tahun 2011-2016
4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021

Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan pembangunan kesehatan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ***adalah “Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan”***.

Sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan disusun agar hasil yang diharapkan dari tujuan pembangunan kesehatan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan secara operasional. Adapun sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dengan indikator :

- Persentase Fasyankes yang terakreditasi

2. Meningkatnya Kesehatan Keluarga.

Dengan indikator :

- Angka Kematian Ibu (AKI)
- Angka Kematian Bayi (AKB)
- Angka Gizi Buruk
- Sukses Rate TB

3. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk hidup sehat.

Dengan indikator ;

- Persentase Nagari Siaga Aktif Mandiri.

4. Meningkatnya kualitas dan pemerataan SDK (Sumber Daya Kesehatan).

Dengan indikator ;

- Persentase Puskesmas yang memiliki SDK yang memenuhi standar.
- Jumlah Rumah Sakit yang memiliki SDK yang memenuhi standar.

5. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan.
Dengan indikator ;
 - Visite Rate Puskesmas
 - Persentase rujukan dari pelayanan primer ke pelayanan sekunder.
 - Angka Kunjungan Rumah sakit
6. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak.
Dengan indikator ;
 - Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care (ANC)
 - Persentase bayi BBLR
7. Meningkatnya status gizi masyarakat.
Dengan indikator ;
 - Persentase balita gizi kurang
8. Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit.
Dengan indikator ;
 - Cakupan Nagari UCI (Universal Child Immunization)
 - Persentase Nagari dengan Posbindu PTM
 - Persentase penanganan KLB/ Bencana < 24 jam
9. Terwujudnya pengembangan lingkungan sehat.
 - Cakupan Nagari Sehat
10. Meningkatnya pengembangan usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat.
 - Persentase Posyandu Mandiri
 - Persentase Poskesri aktif

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 dibuat berdasarkan Renstra Revisi Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021, Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

TABEL. 2.1
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat	1. Persentase Fasyankes yang terakreditasi	%	53%
2.	Meningkatnya kesehatan keluarga	1. Angka kematian Ibu	%	66,3
		2. Angka kematian Bayi	%	4,4
		3. Persentase Gizi Buruk	%	4,8%
		4. Succes Rate TB	%	90%
3.	Meningkatnya peran serta masy. Untuk hidup sehat	1. Persentase nagari siaga aktif mandiri	%	45%

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi masyarakat	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	$(\text{Jumlah Fasyankes yang terakreditasi} / \text{Jumlah seluruh Fasyankes yang ada}) \times 100\%$	Kabid Yankes
2	Meningkatnya kesehatan keluarga	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	$(\text{Jumlah kematian ibu} / \text{Jumlah kelahiran hidup}) \times 100.000 \text{ KH}$	Kabid Kesmas
		Angka Kematian bayi (Per 1000 KH)	$(\text{Jumlah kematian} / \text{Jumlah kelahiran hidup}) \times 1000 \text{ KH}$	Kabid kesmas
		Angka Gizi Buruk	$(\text{Jumlah status yang ditemukan} / \text{Jumlah})$	Kabid Kesmas

			hasil penimbangan (PSG) x 100%	
--	--	--	-----------------------------------	--

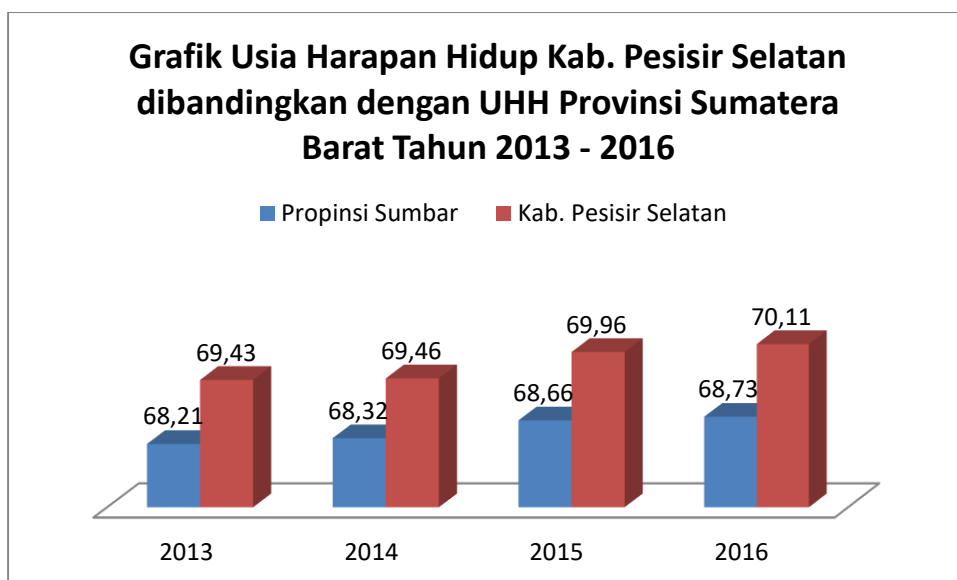
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021, yaitu pada Tahun 2017 yang merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RENSTRA.

Adapun indikator dari tujuan Dinas Kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2016, Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pesisir Selatan telah mencapai 70,11, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Sumatera Barat yaitu 68,73 Tahun. UHH di tingkat Nasional pada tahun 2016 telah dipisah antara laki-laki dan perempuan yaitu untuk laki-laki masih pada angka 69,9 tahun dan perempuan sudah mencapai 72,8 tahun.



Sumber : Dinkes Provinsi Sumatera Barat tahun 2016

Dari grafik diatas, dapat dilihat setiap tahun terjadi peningkatan UHH di Kabupaten Pesisir Selatan, dan angka ini selalu melebihi UHH Provinsi Sumatera Barat. Penetapan angka Usia Harapan Hidup (UHH) baik di tingkat Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat dikeluarkan oleh BPS.

1. Persentase Fasyankes yang terakreditasi

Akreditasi Puskesmas adalah : Pengakuan terhadap Puskesmas yang **diberikan oleh lembaga independen** penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa puskesmas itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.

Standar Akreditasi Puskesmas terdiri dari 3 (Tiga) Kelompok kerja (POKJA) dan masing-masing pokja terdiri dari 3 (Tiga) BAB:

1. Pokja Administrasi dan Manajemen (Admen), terdiri dari:
 - a. Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
 - b. Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
 - c. Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
- II. Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Bab IV. UKM yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)
 - b. Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen UKM (KMUKM)
 - c. Bab VI. Sasaran Kinerja UKM (SKUKM)
- III. Pokja Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
 - a. Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
 - b. Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
 - c. Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Manfaat Akreditasi Puskesmas:

1. Memberikan keunggulan kompetitif
2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes
3. Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat.
4. Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
5. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan upaya Puskesmas kepada masyarakat
6. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer
7. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja
8. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 18 Puskesmas ditambah 2 Rumah Sakit Umum Daerah. Sebelum suatu fasyankes terakreditasi dilakukan dulu pendampingan terhadap fasyankes tersebut. Dari 11 Puskesmas yang telah dilakukan pendampingan dan dilakukan survey akreditasi, baru 8 Puskesmas yang terakreditasi, sedangkan 3 Puskesmas hasilnya belum keluar. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Rumah Sakit sudah terakreditasi yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein Painan, 1 rumah sakit lagi yaitu Rumah Sakit Pratama Tapan belum terakreditasi karena baru beroperasi tahun 2017.

Tabel Jumlah Fasyankes yang Terakreditasi pada tahun 2016 s/d 2017

No.	Jumlah Fasyankes	Disurvey		Terakreditasi		Belum Terakreditasi/ Nilai belum keluar
		2016	2017	2016	2017	
1	18 Puskesmas	2	11	2	10	1
2	2 Rumah Sakit		1		1	
	Jumlah	2	12	2	11 (55%)	1

Dari tabel diatas, dapat dilihat dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah Fasyankes yang terakreditasi. Dari 20 Fasyankes yang telah disurvey, ada 11 Fasyankes yang telah terakreditasi yaitu sebanyak 55%.

2. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak bertujuan untuk menurunkan jumlah dan angka kematian ibu maternal (AKI) dan meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) serta meningkatkan upaya kesehatan ibu dan anak di sarana pelayanan kesehatan. Program ini merupakan indikator dalam mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat (HDI).

Pada tahun 2016, karena diimbangi terjadinya peningkatan angka kelahiran. Sementara itu jumlah kematian ibu maternal terjadi peningkatan dari 6 pada tahun 2016 menjadi 8 pada tahun 2017. Kondisi atau cakupan jumlah kematian ibu maternal 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Cakupan Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Bayi

Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013-2017

No	Indikator	Cakupan				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kematian Ibu (Org)	6	6	5	6	8
2.	AKI/100.000 KH	71	69,5	55,2	63,4	89,3

Sumber : Seksi KIA tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, kalau dilihat Pada tahun 2017, Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki angka yang paling tinggi jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Tetapi Angka ini tidak melebihi batas toleransi angka kematian ibu nasional yaitu AKI tahun 2017 adalah 8 / 8957 KH X 100.000 KH dari target 102 / 100.000 KH.

3. Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)

Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai indikator kesehatan sama pentingnya dengan Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Peningkatan dari 5 pada tahun 2015 menjadi 6 pada tahun 2016. Apabila di konversikan kepada angka kematian ibu maternal, maka AKI tahun 2015 adalah 55,2/100.000 dari target 108/100.00 KH, AKI tahun 2016 adalah 63,4/100.000 KH dari target 102/100.000 KH dan AKB tahun 2015 yaitu 4,6/1.000 KH dari target 27/1.000 KH, AKB tahun 2016 yaitu 5/1.000 KH dari target 23/1.000 KH . Kondisi atau cakupan jumlah kematian ibu maternal dan jumlah kematian bayi selama tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel Cakupan Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Bayi
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013-2017**

No	Indikator	Cakupan				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kematian Bayi (Org)	73	40	42	48	58
2.	AKB/1.000 KH	9	4,6	4,6	5	6,5

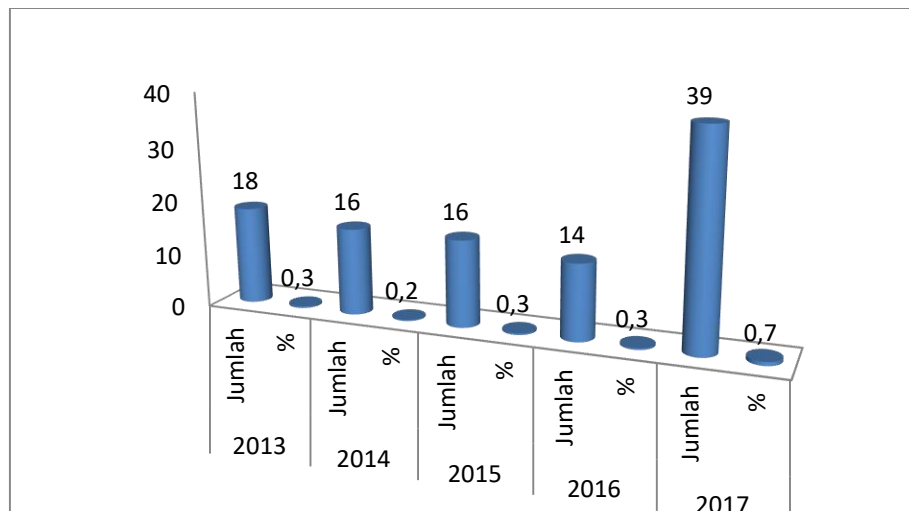
Sumber : Seksi KIA tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, kalau dilihat dari tahun 2016, terjadi peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2017 yaitu 5 menjadi 6,5 dari 8957 Kelahiran Hidup. Tetapi Angka ini masih dibawah ambang batas Nasional yaitu 23/1000 KH.

4. Prevalensi Gizi Buruk

Gizi buruk adalah : keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak dengan antropometri berat badan terhadap tinggi badan BB/TB < -3 SD atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus dan kwashiorkor.

**Tabel : Data Status Gizi Masyarakat
Tahun 2013 s/d 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan**



Terjadinya peningkatan angka prevalensi balita kurang gizi ini karena sudah bekerjanya tenaga gizi semaksimal mungkin dalam menemukan kasus gizi kurang di wilayah Puskesmas masing-masing, sehingga balita gizi kurang dapat terdeteksi/ ditemukan setiap bulannya.

Jika dilihat dari jumlah sampel pemantauan status gizi setiap tahunnya terjadi penambahan sampel sehingga secara tidak langsung dengan bertambahnya sampel maka semakin bertambah juga kasus gizi kurang yang ditemukan.

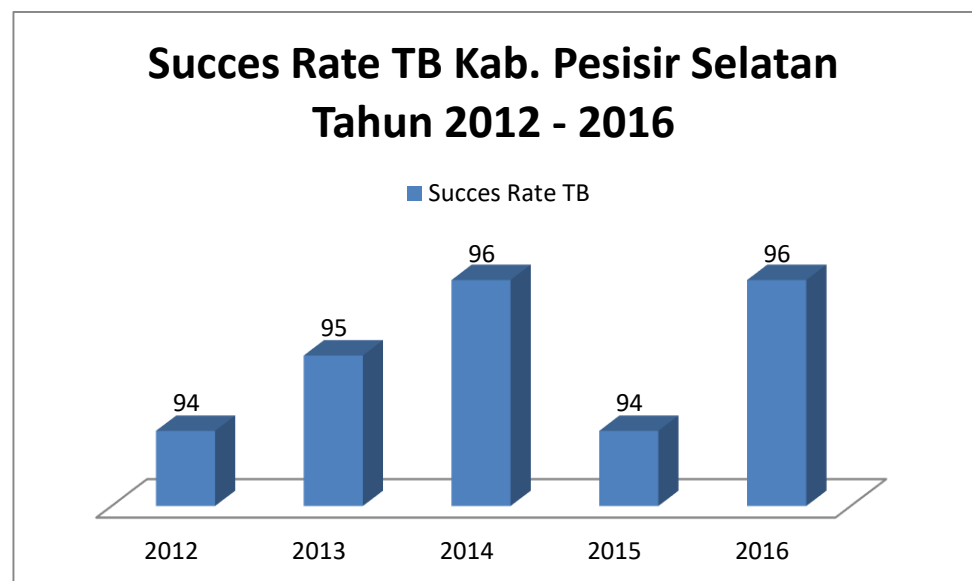
Laporan gizi buruk ini setiap bulannya dibuat oleh bidan desa dan data yang dikirim adalah data penimbangan di Posyandu, sementara data prevalensi balita gizi kurang ini dilakukan oleh tenaga gizi Puskesmas sekali setahun dengan jumlah sampel yang sudah dibagi dan dianggap sudah mewakili untuk wilayah Puskesmas dan pengukurannya langsung dilakukan oleh tenaga gizi Puskesmas ke rumah-rumah balita sehingga data terjaring dan lebih akurat.

5. Succes Rate TB (Angka Keberhasilan Pengobatan)

Beberapa tahun terakhir, upaya pengendalian TB di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat, hal ini antara lain dibuktikan dengan tercapainya indikator penting dalam program pengendalian TB. Faktor Keberhasilan tersebut antara lain : akses pelayanan kesehatan yang semakin baik, adanya pendanaan dan dukungan pemerintah pusat dan daerah, peran serta masyarakat dan swasta yang semakin meningkat, semakin meningkatnya program pengendalian TB, serta banyak kegiatan terobosan yang diinisiasi baik dalam skala global maupun Nasional.

Angka Keberhasilan Pengobatan TB adalah angka kesembuhan ditambah dengan jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatannya dan tidak ada hasil pemeriksaan dahak terakhirnya. Hal ini bisa dijadikan indikator dari kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan.

Angka keberhasilan pengobatan (Success rate) pada pasien dengan BTA positif pada tahun 2012 s/d tahun 2016 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :



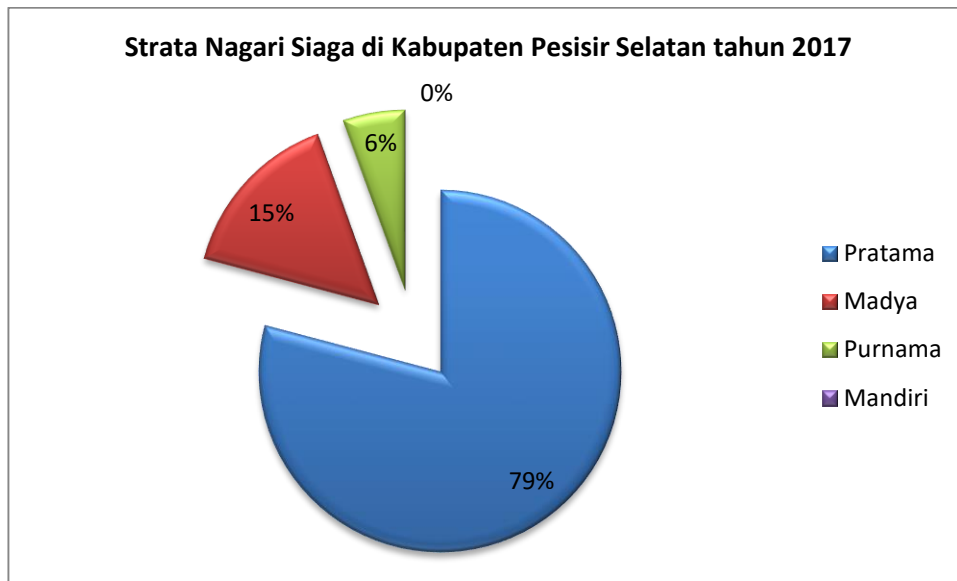
Sumber : Seksi P2P Dinkes 2017

Dari grafik diatas dapat dilihat, untuk kondisi 2017 masih memakai angka tahun 2016, karena success rate TB untuk tahun 2017 hasilnya dapat dikeluarkan pada tahun 2018.

6. Persentase Nagari Siaga Aktif Mandiri

Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri.

Di Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2017 terdapat 182 Nagari Siaga aktif dengan strata : Pratama 144 Nagari, Madya 28 Nagari, Purnama 10 Nagari, dan Mandiri 0.



Pada tahun 2016, Nagari Siaga di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 182 Nagari Siaga dengan kondisi tidak aktif. Melihat kondisi tersebut, maka Program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, menargetkan Nagari Siaga aktif 100% pada tahun 2017, dan angka ini tercapai pada tahun 2017. Nagari Siaga aktif ditandai dengan adanya kegiatan sosialisasi tentang Nagari Siaga terhadap Lintas Sektor dan Lintas Program di masing-masing wilayah kerja dan adanya kelengkapan SK terkait dengan kegiatan Nagari Siaga, seperti SK forum Nagari Siaga, SK Kader Nagari Siaga, Rencana Kerja Nagari Siaga, dan lainnya.

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja Dinas Kesehatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari Tabel

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 11 (sebelas) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel : HASIL PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN
KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	%	21	10	47.6	53	55	104
2.	Meningkatnya kesehatan keluarga	Angka kematian Ibu	%	66,3	63,4	104	66,3	89,3	65,3
		Angka kematian Bayi	%	4,6	5	91.3	4,4	6,5	35
		Prevalensi Gizi Buruk	%	4,8	0,3	194	4,8	0,7	185
		Succes Rate TB	%	85	96	107	90	96	107
3.	Meningkatnya peran serta masy. Untuk hidup sehat	Presentase Nagari Siaga aktif mandiri	%	40	0	0	45	0	0

C. Analisis Capaian Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2017, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisiknya yaitu 80,87%. Adapun realisasi keuangan Dinas kesehatan tahun 2017 yaitu Rp. 59.563.318.842,- dari jumlah anggaran belanja tahun 2017 yaitu Rp.75.785.563.561, dengan rincian Program pendukung sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4,508,704,450	4,207,055,720	93.31
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	9,681,009,700	6,500,154,822	67.14
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	694,593,200	568,646,293	81.87
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	344,924,950	292,015,450	84.66
5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	923,794,700	761,992,008	82.48
6	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	893,746,700	577,449,879	64.61
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2,069,948,400	1,499,238,280	72.43
8	Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas & Jaringannya	10,375,610,000	10,009,119,676	96.47
9	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	33,708,357,811	27,794,258,803	82.46
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	50,267,800	42,569,250	84.68
11	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	2,868,021,300	452,445,365	15.78
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular	402,984,400	323,701,947	80.33
13	Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	6,712,396,500	4,430,025,584	66.00
	JUMLAH	73,234,359,911	57,458,673,077	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017, yaitu dari 6 (Enam) Indikator kinerja yang ditetapkan menjadi Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan, sebanyak 2 (Dua) indikator tercapai dan melampaui target, sedangkan 1 (satu) indikator lainnya hasilnya belum keluar yaitu indikator success TB Rate, karena hasilnya baru bisa dilihat pada tahun berikutnya. Walaupun demikian dari hasil tahun 2016 sudah mencapai dan melebihi target yaitu dari target 90%, dengan capaian 107 %.

B. Saran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan maka dilakukan upaya-upaya, antara lainnya :

1. Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi salah satu upaya yang bisa dilakukan dari segi petugas kesehatan yang berada di Puskesmas yaitu peningkatan kapasitas dan keterampilan petugas, pemberian PMT untuk bumil KEK, peningkatan cakupan pelayanan ANC ibu hamil kontak lengkap (K4).
2. Untuk menurunkan prevalensi gizi buruk sangat dibutuhkan kerjasama lintas sector karena hal ini menyangkut dengan berbagai factor seperti ekonomi, ketersediaan pangan, dan factor lainnya.
3. Meningkatkan fungsi forum nagari siaga, menganggarkan honor kader melalui Dana Nagari serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Nagari Siaga.